

Strategi *Counterbalance* Jepang di Tengah Persaingan Kepemimpinan dengan China dalam Konteks Wacana Regionalisme Asia Timur

Counterbalance Strategy in Central Japan Leadership Competition with China in the Context of East Asian Regionalism Discourse

Oleh

Pradono Budi Saputro¹

ABSTRACT

The rise of China is not only considered as an economic opportunity but also a security threat for the “East Asian” countries. China's increasing influence in the region has made the inclusive regional institutions no longer relevant because no party is able to match the economic and military power of China. Japan uses the momentum to initiate a new regionalism discourse that is more open by inviting extra-regional actors in East Asian regional institutions, as a counterbalance strategy against China.

Keywords: Japan, China, East Asian regionalism, regional leadership rivalry.

ABSTRAK

Kebangkitan Cina tidak hanya dianggap sebagai kesempatan ekonomi tetapi juga ancaman keamanan untuk "Asia Timur" negara. Meningkatkan pengaruh China di wilayah tersebut telah membuat institusi-INSTITUSI regional inklusif tidak lagi relevan karena tidak ada pihak yang mampu menandingi kekuatan ekonomi dan militer China. Jepang menggunakan momentum untuk memulai wacana regionalisme baru yang lebih terbuka dengan mengundang aktor ekstra-regional dalam institusi regional Asia Timur, sebagai strategi penyeimbang terhadap China.

Kata-kaa kunci : Jepang, China, Regionalisme Asia Timur, Persaingan kepemimpinan regional

¹ Alumnus Program Magister Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.

PENDAHULUAN

Secara geografis, yang dimaksud dengan Asia Timur adalah negara-negara yang berada di wilayah Asia Timur Laut (*Northeast Asia*) seperti China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Makau. Akan tetapi, dalam konteks wacana regionalisme, Asia Timur tidak hanya meliputi negara-negara di wilayah Asia Timur Laut, tetapi juga negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara (*Southeast Asia*). Kawasan ini menjadi laboratorium yang menarik untuk menguji proposisi mengenai bagaimana isu-isu internasional berkembang serta kekuatan-kekuatan apa yang mendorong interaksi-interaksi di antara para aktor di kawasan ini.² Di wilayah Asia Timur Laut saja, sensitivitas politik dan keamanan pasca-Perang Dunia II dan Perang Dingin hingga kini masih mewarnai interaksi antarnegara. Belum lagi kehadiran negara-negara Asia Tenggara dalam konteks wacana regionalisme yang semakin menambah nuansa kemajemukan, baik dalam hal suku bangsa, agama, ras, bentuk pemerintahan negara, pertumbuhan ekonomi, maupun kekuatan militernya. Oleh sebab itu, Asia Timur menjadi kawasan dengan keragaman ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya yang sangat tinggi.

Membangun institusi regional di kawasan seperti ini tentu bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Mengkonstruksikan identitas regional di kawasan ini sudah pasti menjadi pekerjaan yang lebih sulit dibandingkan kawasan lain yang masyarakatnya relatif lebih homogen. Hal ini masih ditambah dengan adanya persaingan antarnegara dalam memperlihatkan perannya sebagai kekuatan regional yang dominan di kawasan ini, seperti yang diperlihatkan oleh Jepang dan China sejak wacana regionalisme Asia Timur digulirkan pertama kalinya.

PEMBAHASAN

Konsep Regionalisme dan Kepemimpinan Regional di Asia Timur

² Kent Calder dan Min Ye, *The Making of Northeast Asia* (Stanford: Stanford University Press, 2010), hlm. 270.

Dalam menciptakan suatu konsep institusi regional diperlukan suatu proses. Konsep institusi regional dapat tercipta sebagai hasil dari berbagai proses. Ada dua macam proses institusionalisme regional secara umum.³ *Pertama*, proses level mikro yang berasal dari konsentrasi regional pada aktivitas sektor sipil atau swasta yang saling terkoneksi. Proses ini dikenal sebagai regionalisasi. Regionalisasi lebih merupakan proses yang berbasis masyarakat dan bersifat *bottom-up*. *Kedua*, inisiatif kebijakan publik, seperti *free trade area* atau proyek-proyek negara dalam kerangka kerja sama dan integrasi ekonomi yang berasal dari dialog antarpemerintah dan perjanjian-perjanjian antarpemerintah. Proses ini dikenal dengan nama regionalisme. Berbeda dengan regionalisasi, regionalisme merupakan proses yang berbasis pada kebijakan dan bersifat *top-down*. Kedua proses di atas memang berada di area yang berbeda, namun dalam *paper* ini yang dimaksud regionalisme meliputi kedua proses tersebut.

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai regionalisme, kita perlu merumuskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan regionalisme itu terlebih dahulu. Di sini, penulis akan memakai definisi yang digunakan Christopher Dent mengenai regionalisme. Menurut Dent, regionalisme merupakan struktur, proses, dan aturan yang bekerja menuju koherensi yang lebih besar pada wilayah internasional tertentu dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan hal-hal lain yang terkait.⁴ Berdasarkan definisi tersebut, regionalisme dapat mencakup kedua proses yang disebut sebelumnya, baik “regionalisasi” maupun “regionalisme” secara sempit. Akan tetapi, penulis hanya akan membatasi pembahasan dalam *paper* ini pada proses yang kedua.

Regionalisme idealnya mampu menjadi suatu jawaban akan kebutuhan ekonomi dan keamanan bagi negara-negara di suatu kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh negara yang berada di suatu kawasan tentu harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan

³ Christopher M. Dent, *East Asian Regionalism* (London: Routledge, 2008), hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

integrasi kawasan. Jika tidak, suatu negara akan termarjinalkan dalam pergaulan internasionalnya dengan aktor-aktor lain di kawasan tersebut. Peran serta negara-negara di kawasan haruslah nyata dan berdampak positif terhadap kebutuhan nasional mereka.⁵ Untuk mendorong hal tersebut, dibutuhkan suatu model kepemimpinan regional, terutama dari aktor-aktor yang memiliki pengaruh di kawasan.

Jepang dan China merupakan dua *regional actor* yang paling berpengaruh di Asia Timur. Hubungan antara keduanya memang kurang harmonis. Sepanjang sejarah, keduanya telah terlibat perseteruan yang panjang. Setidaknya, ada enam isu yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis. Isu-isu tersebut yaitu isu sejarah, isu Taiwan, isu sengketa Kepulauan Senkaku (Diaoyu), isu kerja sama militer Jepang-Amerika Serikat (AS), isu kompensasi perang, dan terkait peninggalan senjata kimia Jepang di China. Namun, bagaimanapun juga kita tidak dapat memungkiri bahwa hubungan antara Jepang dan China penting bagi masa depan regionalisme Asia Timur. Keduanya adalah dua kekuatan terbesar di Asia Timur dan *gross domestic product* (GDP) gabungan keduanya mencapai hampir 80% dari total GDP negara-negara Asia Timur sehingga tidak salah jika Asia Timur berpeluang menjadi sentra perekonomian baru. Tanpa salah satunya, pengaruh kawasan Asia Timur terhadap sistem internasional akan jauh berkurang.⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan peran kedua negara tersebut dalam kepemimpinan regional di Asia Timur dan kesamaan pemahaman mengenai regionalisme yang dikehendaki.

Kepemimpinan regional hanya akan dicapai bila aktor-aktor yang menjadi pemimpinnya mengidentifikasi atau paling tidak mengasosiasikan diri dengan kawasannya. Proses mengasosiasikan diri dengan kawasan menekankan pada poin bahwa tautan asosiatif yang terbentuk antaraktor sebagian besarnya didorong oleh kepentingan bersama dan hubungan sosial

⁵ Jessie P.H. Poon, "Regionalism in the Asia Pacific: Is Geography Destiny?", *Area*, Vol. 33, No. 3 (September 2001), hlm. 253.

⁶ Dent, *op. cit.*, hlm. 172.

yang mendalam.⁷ Di satu sisi, Jepang mungkin mengasosiasikan diri dengan Asia Timur karena kebutuhan ekonomi, politik, dan keamanannya, namun di sisi lain mengasosiasikan masyarakat Jepang sebagai bagian dari komunitas regional di Asia Timur masih merupakan hal yang perlu diperdebatkan. Jepang mungkin lebih merasa sebagai bagian dari Barat karena kemajuan industri, keanggotaan dalam G8, dan hubungan dekatnya dengan AS.⁸

Upaya untuk mengasosiasikan diri dan membangun kesepahaman bersama dengan aktor-aktor lain di kawasan menjadi tantangan besar bagi Jepang. Berbagai kendala ditemui sepanjang perjalanan. Kepemimpinan yang minim, ketidaksamaan identitas, stagnansi integrasi ekonomi, rivalitas antarnegara, dan tekanan dari aktor-aktor ekstraregional yang berpengaruh di kawasan membuat Jepang harus berkompromi dan mencari alternatif yang terbaik untuk mengasosiasikan dirinya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur.

Oleh karena itu, Jepang berusaha mengasosiasikan diri dengan cara-cara lain agar lebih diterima dan lebih dekat dengan negara-negara lain di kawasan, seperti membangun kepercayaan negara-negara sekawasan melalui program *Official Development Assistance* (ODA). ODA telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan ekonomi di negara-negara yang lebih lemah secara ekonomi di kawasan sejak tahun 1990-an.⁹ Sementara, China lebih mampu memainkan perannya secara proaktif dalam hubungan internasional, terutama dalam hal keamanan konvensional di mana Jepang tidak dapat melakukannya karena terbebani kendala konstitusional. China juga aktif membangun hubungan keamanan yang lebih dekat dengan beberapa negara Asia dan memainkan peran yang lebih proaktif dalam institusi-institusi multilateral beberapa tahun

⁷ Christopher M. Dent (ed.), *China, Japan and Regional Leadership in East Asia* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2008), hlm. 291.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Op. cit.*, hlm. 174.

terakhir ini.¹⁰ Oleh sebab itu, China memiliki keunggulan atas Jepang pada tingkat regional karena telah menunjukkan tajinya pada tingkat yang lebih tinggi.

China menunjukkan kepemimpinannya dalam komunitas negara berkembang, seperti melalui koalisi G20 dalam negosiasi perdagangan multilateral di Putaran Doha WTO.¹¹ Dalam hal ini terlihat pemikiran bahwa China berusaha mengkonstruksikan kondisi di mana kebangkitan Negeri Tirai Bambu tersebut akan menjadi bagian dari kebangkitan Asia melalui integrasi regional dengan mereka sebagai pemimpinnya. Kebangkitan atau pembangunan yang damai menjadi doktrin yang dipersepsikan kepada negara-negara luar, terutama negara-negara tetangganya.¹² Keinginan ini membuat mereka semakin aktif mendekati negara-negara di kawasannya, terutama dengan negara-negara ASEAN.

Persaingan dalam Wacana Regionalisme Asia Timur

Memasuki abad ke-21, ASEAN menjadi obyek rebutan. China dan Jepang semakin gencar memperebutkan pengaruh di wilayah ini. Pada tahun 2000, Perdana Menteri Zhu Rongji dari China mencetuskan pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), yang lalu disepakati pada tahun 2002 di Kamboja dan diberlakukan mulai 1 Januari 2010.¹³ Meski telah disepakati, ACFTA menimbulkan keresahan bagi negara-negara ASEAN bahwa produk-produk China akan membanjiri pasar ASEAN karena adanya kemiripan struktur industri negara-negara ASEAN dengan China sehingga negara-negara ASEAN akan menghadapi kompetisi langsung dengan China pada sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, dan *furniture*.¹⁴ Namun, bagaimanapun

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 173.

¹¹ *Op. cit.*, hlm. 300.

¹² Zhang Tiejun, "China and East Asian Community", *International Review* (Third 2005), hlm. 32.

¹³ <http://www.nytimes.com/2010/01/01/business/global/01trade.html> (diakses pada tanggal 20 April 2014).

¹⁴ Takashi Terada, "Creating an East Asian Regionalism: The Institutionalization of ASEAN+3 and China-Japan Directional Leadership", *The Japanese Economy*, Vol. 32, No. 2 (Summer 2004), hlm. 81.

juga disepakatinya ACFTA pada saat itu menunjukkan bahwa China telah selangkah lebih maju dalam meletakkan fondasi penting bagi terwujudnya integrasi regional Asia Timur.

Disepakatinya ACFTA itu tak pelak membuat Jepang berang. Jepang benar-benar tidak siap dan gagal memprediksi kemungkinan tersebut meskipun mereka telah memiliki gagasan besar untuk kawasan ini. Dalam rangka menjaga stabilitas moneter di kawasan pasca-krisis keuangan Asia 1997, mereka pernah menggagas suatu dana moneter regional yang disebut *Asian Monetary Fund* (AMF) dan mengajukan diri sebagai donatur utamanya.¹⁵ Keinginan mereka dalam membangun AMF di samping untuk membantu negara-negara tetangganya, adalah untuk mengamankan peran dan pengaruh mereka di kawasan. Ide mengenai AMF ini mendapat sambutan hangat oleh negara-negara sekawasan, tetapi mendapat kritik tajam dari AS. AS menganggap AMF sebagai sesuatu yang tidak perlu sebab akan menipiskan peran *International Monetary Fund* (IMF) dan AS, sebagai pihak yang mendominasi IMF. AS berpendapat bahwa IMF telah memiliki cukup sumber daya dan pengalaman untuk menangani krisis finansial global, sedangkan Jepang mungkin mempunyai sumber daya tetapi tidak berpengalaman.¹⁶ Meskipun Jepang menampik bahwa AMF akan mengambil “lahan” IMF. Akibatnya, AMF gagal direalisasikan.

Gagasan regionalisme pernah muncul pada tahun 1994. Pada saat itu, ASEAN menggagas *ASEAN Regional Forum* (ARF). Jepang mendukung gagasan tersebut. Langkah Jepang tersebut menjadi salah satu kontribusi signifikan Jepang di kawasan ASEAN karena berhasil meyakinkan AS mengenai pentingnya kerja sama keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik di bawah kepemimpinan ASEAN. Sebelumnya, AS cenderung lebih memilih

¹⁵ Hitoshi Tanaka dan Adam P. Liff, “Japan’s Foreign Policy and East Asian Regionalism”, Paper based on “New Regional Security Architecture for Asia”, a Council on Foreign Relations project directed by Senior Fellow Sheila A. Smith, *International Institutions and Global Governance Program, Japan Studies Program, Council on Foreign Relations* (Desember 2009), hlm. 4.

¹⁶ S. Javed Maswood (ed.), *Japan and East Asian Regionalism* (London: Routledge, 2001), hlm. 139.

perjanjian-perjanjian keamanan bilateral dengan para mitranya di Asia.¹⁷ Saat ini, ARF telah menjadi forum dialog keamanan multilateral yang penting di kawasan Asia Pasifik dan memiliki 27 anggota.¹⁸

Gagasan regionalisme kembali mencuat ketika Asia dilanda krisis moneter. Pada saat itu, dibentuk *ASEAN Plus Three* (APT). APT beranggotaan negara-negara ASEAN ditambah dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Hingga 1999, ASEAN tidak yakin bila Jepang akan mendukung gagasan APT secara penuh karena Jepang hanya berkonsentrasi pada hubungan bilateral Jepang-ASEAN dan lebih menitikberatkan fokus pada Asia Pasifik. Namun, hal tersebut berbalik sejak itu. Sejak 1999, Menteri Luar Negeri Jepang menggunakan istilah “Asia Timur” dan menggambarkan pertemuan APT sebagai “*East Asian Summit* pada tataran praktis”.¹⁹

Untuk mewujudkan kerja sama nyata antaranggota APT, dibentuklah *East Asian Vision Group* (EAVG) yang beranggotakan intelektual-intelektual APT. Beberapa rekomendasi EAVG antara lain pembentukan *East Asia Free Trade Area*, *East Asia Investment Information Network*, fasilitas pendanaan kawasan, dan *East Asia Summit* (EAS).²⁰ Yang terakhir dibentuk dalam rangka mewujudkan gagasan regionalisme Asia Timur yang inklusif dan terbuka. China tidak sepakat dengan gagasan regionalisme itu dan berpendapat bahwa lebih baik APT yang dijadikan sebagai fokus institusi regional Asia Timur sebab APT, yang hanya melibatkan negara-negara ASEAN plus tiga negara Asia Timur, menjadi strategi China untuk membentengi kawasan dari

¹⁷ Mushahid Ali dan Hiro Katsumata, “East Asian Regional Cooperation: Japan Falling Behind China?”, *RSIS Commentaries*, No. 002/2013 (3 Januari 2013), hlm. 2.

¹⁸ Keanggotaan ARF saat ini meliputi 10 negara ASEAN ditambah China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Australia, India, Selandia Baru, Rusia, AS, Kanada, Bangladesh, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Papua Nugini, Timor Leste, dan Uni Eropa.

¹⁹ Takashi Terada, “Constructing an ‘East Asian’ Concept and Growing Regional Identity: From EAEC to ASEAN+3”, *The Pacific Review*, Vol. 16, No. 2 (2003), hlm. 267.

²⁰ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*. Edisi Ke-19 (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011), hlm. 196.

pengaruh *big powers*. Ini terlihat karena dalam APT tidak ada negara lain yang secara ekonomi maupun militer mampu menandingi kedigdayaan China.

Dengan regionalisme terbuka, kemungkinan masuknya pengaruh aktor-aktor ekstraregional di kawasan Asia Timur tentu akan lebih besar, terlebih karena EAS dianggap sebagai upaya Jepang untuk mengebiri pengaruh China di Asia Timur. Oleh karena itu, China lebih memilih APT sebagai sarana untuk menunjukkan kepemimpinannya sekaligus mempertegas dominasinya sebagai hegemon regional. Sementara, Jepang yang ingin mengangkat kembali kepemimpinannya di tingkat regional menganggap APT tidak layak lagi dijadikan forum utama regional. Kekhawatiran akan munculnya dominasi China di APT itulah yang mendorong gagasan regionalisme terbuka.

Kebangkitan China memang bagaikan dua sisi mata uang. Bagi negara-negara di kawasan ASEAN, kebangkitan China bukan hanya dianggap sebagai sebuah peluang ekonomi, melainkan juga ancaman keamanan, seperti ditunjukkan dengan sikap keras kepala China dalam kasus sengketa wilayah di Laut China Selatan. Dengan regionalisme terbuka, negara-negara di kawasan Asia Timur secara umum, ataupun ASEAN secara khusus, dapat “mengundang” aktor-aktor ekstraregional untuk mencegah China-sentrisme dalam institusi regional Asia Timur. Karena kekhawatiran akan China-sentrisme itu dirasakan pula oleh banyak negara ASEAN maka gagasan itu dapat dengan mudah diterima negara-negara lain di kawasan.

Gagasan itu akhirnya tercipta pada tahun 2004. EAS menjadi *regional grouping* Asia Timur yang bersifat terbuka dengan fokus pada isu-isu ekonomi. Selain negara-negara anggota APT, Australia, Selandia Baru, dan India turut menjadi anggota EAS. Australia dan Selandia Baru, sebagai sesama negara demokrasi sekutu AS, dapat menjadi sekutu Jepang, sementara India dinilai dapat menjadi penyeimbang China. Karena “keterbukaannya” pula, EAS

didasarkan pada *universal values* seperti demokrasi, HAM, dan peraturan hukum ketimbang *Asian values* seperti nilai-nilai keluarga, masyarakat, keselarasan sosial, penerimaan terhadap hierarki, dan penghormatan terhadap otoritas yang relatif sulit dijadikan perekat antaranggota. *Universal values* yang tidak disukai China menjadi alat Jepang untuk meng-*counter* China. Lagipula, mengkonstruksikan *Asian values* dalam institusi regional “terbuka” seperti EAS ini bukan pekerjaan mudah dan cenderung akan mendapat resistensi dari “anggota-anggota undangan”.

Meskipun begitu, persaingan Jepang dengan China dalam kepemimpinan regional tidak lantas sirna dengan EAS. Perang wacana dan gagasan untuk memperebutkan pengaruh di kawasan terus berlangsung. EAS IV di Thailand pada tahun 2009 mencatat inisiatif Jepang untuk membangun suatu masyarakat tahan bencana di Asia Timur serta tawaran China untuk memberikan ribuan beasiswa bagi negara-negara berkembang di EAS untuk lima tahun ke depan.²¹ Pada EAS VI yang berlangsung tahun 2011 di Indonesia, AS dan Rusia secara resmi bergabung sebagai anggota baru.²² Masuknya kedua *extraregional big power* itu sesungguhnya merupakan bagian dari strategi Jepang untuk menebar pengaruh yang lebih besar di kawasan.

Wacana Regionalisme sebagai Strategi *Counterbalance*

Setelah EAS, wacana baru mengenai regionalisme yang disebut *East Asian Community* (EAC) diusulkan dalam rangka menciptakan suatu *values-based community*. Ada beberapa poin yang ditekankan oleh Jepang dalam membangun regionalisme Asia Timur.²³ *Pertama*, regionalisme di kawasan ini menggunakan konsep regionalisme terbuka yang memelihara

²¹ *Ibid.*, hlm. 202.

²² <http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20100720-227989.html> (diakses pada tanggal 20 April 2014).

²³ Yul Sohn, “Japan’s New Regionalism: China Shock, Values, and the East Asian Community”, *Asian Survey*, Vol. 50, No. 3 (Mei/Juni 2010), hlm. 498.

hubungan baik dengan mitra-mitra ekstraregional berdasarkan prinsip keterbukaan, fleksibilitas, transparansi, dan inklusivitas. *Kedua*, Jepang menekankan pada pendekatan fungsional dalam bidang perdagangan, keuangan, energi, lingkungan, dan *human security*, kontras dengan pendekatan institusional yang bertujuan menciptakan institusionalisasi yang komprehensif, terintegrasi, dan mendalam pada kerangka kawasan. *Ketiga*, Jepang menekankan pada konsep komunitas yang menanamkan nilai-nilai bersama (*kyôdôtai*).

Tiga poin tersebut memperlihatkan bahwa Jepang berusaha menggunakan kombinasi pendekatan liberal dan konstruktivis. Pendekatan liberal ditunjukkan dengan ide regionalisme yang berbasis pembangunan hubungan kerja sama dengan mendirikan seperangkat aturan dan norma yang mengikat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya karena antara aktor-aktor tersebut memiliki interdependensi. Ide ini terlihat dari poin pertama dan kedua. Sementara, pendekatan konstruktivis ditunjukkan dari poin ketiga. Pendekatan konstruktivis menekankan regionalisme yang dibentuk berdasarkan terwujudnya pemahaman bersama dan pembangunan identitas regional berdasarkan pemahaman tersebut.

Dalam mewujudkan regionalisme itu, tentu diperlukan suatu *shared experience* antaranggota. Langkah Jepang dalam menciptakan *shared experience* ini dapat dijelaskan dengan memakai pendekatan sosiologi ala Stephen Vaisey. Menurut Vaisey, ada dua strategi yang dapat digunakan dalam menciptakan *shared experience* di sebuah komunitas, yaitu dengan pendekatan struktural dan pendekatan substantif. Pendekatan struktural percaya bahwa solidaritas disebabkan oleh adanya interaksi. Karena suatu komunitas berkembang dari infrastruktur jaringan sosial, pendekatan ini berusaha menciptakan jalan dan tempat pertemuan bersama untuk menyediakan peluang terwujudnya interaksi.²⁴ Sementara, pendekatan substantif berpusat pada mekanisme *shared moral order* untuk menciptakan komunitas. Tanpa adanya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 502.

nilai-nilai bersama, sebuah komunitas tidak akan memiliki kekuatan sentrifugal.²⁵ Kedua pendekatan sosiologi tersebut sejalan dengan pendekatan konstruktivis yang dijelaskan di atas. Baik interaksi maupun nilai-nilai bersama memperlihatkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran regional melalui proses sosialisasi.

Sosialisasi intraregional memiliki nilai penting bagi konstruktivis dalam menciptakan suatu komunitas. Kepentingan dan pemahaman bersama terhadap isu-isu regional akan terbentuk melalui proses sosialisasi. Dengan interaksi dan nilai-nilai bersama, terlihat bahwa Jepang berusaha menciptakan terbentuknya sebuah komunitas yang mampu menyatukan China, negara-negara anggota ASEAN, dan mitra-mitra penyeimbangannya seperti Australia, Selandia Baru, dan India. Jepang juga memandang regionalisme ini sebagai sebuah perkembangan yang positif sebab kawasan yang lebih stabil dan sejahtera secara langsung akan melayani kepentingan ekonomi dan keamanan Jepang.²⁶

Akan tetapi, mewujudkan upaya tersebut bukanlah merupakan perkara mudah. Beberapa kendala besar harus Jepang hadapi dalam mewujudkan komunitas tersebut. Sentimen anti-Jepang di beberapa negara Asia Timur belum menurun pasca Perang Dunia II. Di samping itu, seiring dengan bertransformasinya Jepang menjadi negara demokratis, negara itu kerap diidentifikasi sebagai bagian dari dunia Barat. Hal-hal tersebut membuat Jepang ragu untuk mengangkat regionalisme yang berbasis *Asian values* atau institusi yang tidak berdasarkan pada universalisme dan kapitalisme pasar seperti yang sering didengungkan AS.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Jepang kesulitan menggunakan pendekatan konstruktivisnya. Asia Timur adalah kawasan dengan keberagaman yang luas. Proses sosialisasi untuk merumuskan *Asian values* tentu akan memakan waktu yang sangat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tanaka dan Liff, *loc. cit.*, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 503-504.

panjang. Karena itulah, Jepang mengambil jalan tengah dengan lebih mengedepankan pendekatan liberal yang mengangkat *universal values* untuk menciptakan kondusivitas bagi terwujudnya kerja sama.

Memainkan Peran di Tengah Iklim Persaingan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, China menganggap bahwa lebih baik regionalisme yang sudah ada, terutama APT, yang dijadikan fokus oleh negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Keinginan China ini cukup beralasan sebab APT yang hanya melibatkan negara-negara ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi strategi China untuk membentengi kawasan dari pengaruh *big powers*. Oleh karena itu, China memilih APT sebagai sarana untuk memperlihatkan kepemimpinannya di tingkat regional sekaligus mempertegas dominasinya sebagai hegemon regional.

China juga tidak senang dengan dibentuknya *multilateral grouping* yang dinilai tidak Asia-sentris, seperti EAS.²⁸ Ini tidak terlepas dari ambisi negara tersebut dalam APT, yang selain untuk menunjukkan kepemimpinan di tingkat regional dan mempertegas dominasinya, adalah untuk menarik Jepang dan negara-negara lain di kawasan tersebut dari pengaruh AS. Upaya itu akan jauh lebih mudah dilakukan dalam APT daripada dalam suatu regionalisme terbuka.

Hal itu yang dibaca oleh Jepang sebagai ancaman jika APT dijadikan sebagai forum utama regional. Kekhawatiran bahwa China akan mendominasi APT tidak hanya dirasakan oleh Jepang, tetapi juga oleh beberapa negara ASEAN. Oleh sebab itu, gagasan membentuk

²⁸ Aurelia George Mulgan, "Is There a 'Japanese' Concept of an East Asia Community?", <http://www.eastasiaforum.org/2009/11/06/blurred-vision-is-there-a-japanese-concept-of-an-east-asia-community/> (diakses pada tanggal 20 April 2014).

regionalisme terbuka yang melibatkan aktor-aktor ekstraregional dinilai akan mendapat sambutan hangat dari negara-negara lain di kawasan.

Ada dua faktor antusiasme Jepang terhadap EAC.²⁹ *Pertama*, konsep komunitas merupakan gagasan ideal Jepang untuk membawa nilai-nilai universal. Dengan membawa *universal values* sebagai nilai inti komunitas, Jepang mencoba mengikat China dalam kerangka multilateral inklusif agar menerapkan nilai-nilai tersebut. Apabila, mengabaikan nilai-nilai tersebut, China harus “membayarnya” dengan sangat mahal. Langkah-langkah *balancing* terhadap China dapat dengan mudah dilakukan dengan adanya aktor-aktor ekstraregional yang dilibatkan sebagai mitra EAC. *Kedua*, *universal values* memungkinkan Jepang mendefinisikan ulang cakupan keanggotaan EAC. Untuk itulah, aktor-aktor ekstraregional perlu dilibatkan. Kehadiran negara-negara tersebut dipandang akan memberikan *strategic leverage* bagi Jepang di samping memastikan bahwa China tidak akan memperoleh posisi dominan dalam komunitas ini.

Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa Jepang yang semula condong ke liberal harus berpikir dengan paradigma realis. *Universal values* ala liberalisme dapat menjadi alat kepentingan aktor-aktor tertentu dalam membendung pengaruh aktor lainnya yang menjadi ancaman. Terlebih, China yang *nota bene* bukan “negara demokratis”, menentang universalitas itu. Rekonfigurasi geografis tersebut secara jelas dapat ditafsirkan pula sebagai langkah untuk mengurangi kecemasan AS terhadap munculnya regionalisme Asia yang tertutup dan inklusif. Di satu sisi, Jepang berharap EAC yang berbasis *universal values* ini dapat mempertegas kembali perannya dalam komunitas regional, sementara di sisi lain, Jepang ingin memastikan bahwa komunitas ini tidak akan mengganggu kepentingan AS di kawasan ini.³⁰ Hal ini wajar sebab

²⁹ *Loc. cit.*, hlm. 517-518.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 518.

sebagai sekutu kunci AS di Asia Timur, Jepang berusaha menjaga perasaan sekutunya yang mempunyai kepentingan di sana sambil mengejar kepentingan mereka sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlu diingat bahwa baik ARF, APT, maupun EAS bukan suatu organisasi formal, melainkan suatu sistem dalam bentuk forum antarpemerintah untuk membicarakan kerja sama dan integrasi regional. ARF, APT, dan EAS tidak memiliki sekretariat ataupun agen koordinasi tetap sebagaimana suatu organisasi formal. Namun, forum-forum tersebut penting bagi masa depan integrasi regional Asia Timur. Masa depan integrasi regional itu tidak dapat kita lepaskan dari peran Jepang dan China serta hubungan kedua negara tersebut di masa depan.

Dalam beberapa tahun ke depan, hubungan antara Jepang dengan China kemungkinan besar tidak akan mengalami banyak perubahan dan cenderung stabil, mengingat hubungan ekonomi yang baik antara keduanya meskipun ekspansi ekonomi dan militer China terus menimbulkan persepsi ancaman bagi Jepang. Akan tetapi, kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Jepang dan China di berbagai sektor kemungkinan akan lebih menjadi prioritas ke depan.

Namun, Jepang tetap akan memainkan peran ganda dalam percaturan politik kawasan, mengejar peran sebagai kekuatan utama di kawasan dalam persaingan hegemoni regional dengan China serta menjaga kepentingan AS di kawasan. Oleh sebab itu, Jepang harus mampu menjembatani kedua peran tersebut agar tidak terlalu tenggelam dalam pusaran arus kepentingan. Kesuksesan dalam memainkan kedua peran tersebut akan menjadi nilai tambah dalam memuluskan regionalisme yang mereka usung sekaligus mempertegas kembali posisi mereka sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan

Daftar Pustaka

A. Buku

- Calder, Kent dan Min Ye. *The Making of Northeast Asia*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Dent, Christopher M. (ed.). *China, Japan and Regional Leadership in East Asia*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 2008.
- Dent, Christopher M. *East Asian Regionalism*. London: Routledge, 2008.
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *ASEAN Selayang Pandang*. Edisi Ke-19. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011.
- Maswood, S. Javed (ed.). *Japan and East Asian Regionalism*. London: Routledge, 2001.

B. Jurnal

- Ali, Mushahid dan Hiro Katsumata. "East Asian Regional Cooperation: Japan Falling Behind China?". *RSIS Commentaries*, No. 002/2013 (3 Januari 2013).
- Chung, Chien-Peng. "China and Japan in 'ASEAN Plus' Multilateral Agreements". *Asian Survey*, Vol. 53, No. 5 (September/Oktobre 2013).
- Poon, Jessie P.H. "Regionalism in the Asia Pacific: Is Geography Destiny?". *Area*, Vol. 33, No. 3 (September 2001).
- Sohn, Yul. "Japan's New Regionalism: China Shock, Values, and the East Asian Community". *Asian Survey*, Vol. 50, No. 3 (Mei/Juni 2010).
- Tanaka, Hitoshi dan Adam P. Liff. "Japan's Foreign Policy and East Asian Regionalism". Paper based on "New Regional Security Architecture for Asia", a Council on Foreign Relations project directed by Senior Fellow Sheila A. Smith. *International Institutions and Global Governance Program, Japan Studies Program, Council on Foreign Relations* (Desember 2009).
- Terada, Takashi. "Constructing an 'East Asian' Concept and Growing Regional Identity: From EAEC to ASEAN+3". *The Pacific Review*, Vol. 16, No. 2 (2003).
- Terada, Takashi. "Creating an East Asian Regionalism: The Institutionalization of ASEAN+3 and China-Japan Directional Leadership". *The Japanese Economy*, Vol. 32, No. 2 (Summer 2004).

Zhang, Tiejun. "China and East Asian Community". *International Review* (Third 2005).

C. Internet

Mulgan, Aurelia George. "Is There a 'Japanese' Concept of an East Asia Community?".

<http://www.eastasiaforum.org/2009/11/06/blurred-vision-is-there-a-japanese-concept-of-an-east-asia-community/> (diakses pada tanggal 20 April 2014).

<http://www.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20100720-227989.html>

(diakses pada tanggal 20 April 2014).

<http://www.nytimes.com/2010/01/01/business/global/01trade.html> (diakses pada tanggal 20 April 2014).